



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BONE
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAJAMUDDIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 21751

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 755.000.000

1. Tanah Seluas 187 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 75.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/80 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/63 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 234 m2/126 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah Seluas 525 m2 di KAB / KOTA BONE, WARISAN Rp. 25.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m2/9 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 133.000.000

1. MOBIL, TOYOTA SIENTA 1,5 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
2. MOTOR, SUZUKI UD 110 EE Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, YAMAHA BJ8 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 31.250.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	79.119.569
F. HARTA LAINNYA	Rp.	16.800.000
Sub Total	Rp.	1.015.169.569
III. HUTANG	Rp.	140.834.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	874.335.569

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.